

**PENGARUH AKUNTABILITAS, KESESUAIAN KOMPENSASI,  
PENGENDALIAN INTERNAL, DAN BUDAYA ORGANISASI  
TERHADAP KECURANGAN DANA DESA**  
(Studi Empiris pada Desa di Kota Pariaman)

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



**Oleh:**

**ELISA PUTRI MASNI**

**2017/17043011**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI  
PENGARUH AKUNTABILITAS, KESESUAIAN KOMPENSASI,  
PENGENDALIAN INTERNAL, DAN BUDAYA ORGANISASI  
TERHADAP KECURANGAN DANA DESA  
*(Studi Empiris pada Desa di Kota Pariaman)*

Nama : Elisa Putri Masni  
Nim/TM : 17043011/2017  
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi

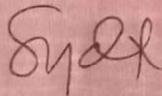
Padang, Desember 2022

Disetujui Oleh:

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing



Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, CA, Ph.D  
NIP. 19800103 200212 2 001



Vita Fitria Sari, SE, M. Si  
NIP. 19870515 201012 2 009

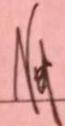
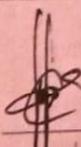
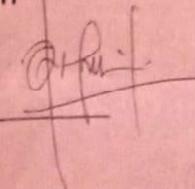
HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Skripsi  
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*

Judul : Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi,  
Pengendalian Internal, dan Budaya Organisasi Terhadap  
Kecurangan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa di Kota  
Pariaman)  
Nama : Elisa Putri Masni  
NIM/TM : 17043011/2017  
Jurusan : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Desember 2022

Tim Penguji

No. Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Vita Fitria Sari, SE, M.Si	1. 
2. Anggota	: Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak	2. 
3. Anggota	: Halmawati, SE, M.Si	3. 

## ***ABSTRACT***

*This study aims to examine the effect of accountability, compensation suitability, internal control, and organizational culture on village fund fraud. The population in this study were 55 villages in the City of Pariaman. The sampling method used is purposive sampling method. Purposive sampling is a sampling technique where the sample is selected based on certain criteria. In this study, the data source used is the primary data source. Data collection techniques in this study using a questionnaire. The results of this study indicate that the suitability of compensation and Internal control has no effect on fraudulent village funds, while accountability and organizational culture have a negative and significant effect on fraudulent village fund.*

***Keywords*** : *accountability, compensation, fraud, internal control, organizational culture, and village fund.*

## ABSTRAK

**Elisa Putri Masni, 17043011/2017. ‘ ‘ Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Internal, dan Budaya Organisasi Terhadap Kecurangan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa di Kota Pariaman)’’. Skripsi. Padang: Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.**

**Pembimbing: Vita Fitria Sari, S.E, M.Si**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, kesesuaian kompensasi, pengendalian internal, dan budaya organisasi terhadap kecurangan dana desa. Populasi dalam penelitian ini adalah 55 desa di Kota Pariaman. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi dan pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kecurangan dana desa, sedangkan akuntabilitas dan budaya organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan dana desa.

**Kata Kunci : Akuntabilitas, Kompensasi, Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Kecurangan dan Dana Desa.**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elisa Putri Masni  
TM/NIM : 2017/17043011  
Tempat/Tanggal Lahir : Durian Daun/ 27 agustus 1999  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Durian Daun, Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai  
Limau, Kabupaten Padang Pariaman  
No. HP/Telp. : 082384053385  
Judul Skripsi : Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi,  
Pengendalian Internal, dan Budaya Organisasi  
Terhadap Kecurangan Dana Desa (*Studi Empiris  
pada Desa di Kota Pariaman*)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Negeri Padang atau di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan

dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani **asli** oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua jurusan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **sanksi akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh melalui karya tulis/skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Desember 2022

Saya yang menyatakan

Elisa Putri Masni

NIM. 17043011

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Internal dan Budaya Organisasi terhadap Kecurangan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa di Kota Pariaman)” ini dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan strata satu pada Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Padang. Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Ganefri, M.Pd., Ph.D. selaku rektor Universitas Negeri Padang;
2. Bapak Dr. Idris, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang;
3. Ibu Sany Dwita, S.E., M.Si., Ak., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Padang;
4. Ibu Vita Fitria Sari, S.E, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Padang dan sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing dan banyak memberi masukan serta saran kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi;

5. Ibu Charoline Cheisviyanny, S.E, M.Ak selaku dosen penelaah proposal sekaligus dosen penguji I yang telah memberikan kritikan, saran, dan masukan kepada penulis sehingga mampu menghasilkan skripsi yang lebih baik;
6. Ibu Halmawati, S.E, M.Si selaku dosen penguji II yang telah memberikan saran dan masukan sehingga penulis mampu menghasilkan skripsi yang lebih baik;
7. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah selingkup Kota Pariaman, khususnya kepada Bapak/Ibu Kantor Desa se-Kota pariaman yang telah banyak memberikan bantuan selama proses penelitian;
8. Pemerintah Daerah kota Pariaman yang telah memberikan bantuan pendidikan kepada penulis;
9. Teristimewa untuk orang tua yang sangat penulis cintai serta saudara terkasih yang telah memberikan dukungan, do'a, dan semangat kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini;
10. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Akuntansi 2017, khususnya Kelas A, terima kasih atas dukungan, saran, dan kebersamaan kita selama ini.
11. Serta terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kelemahan dan keterbatasan serta jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menjadikan skripsi ini lebih baik lagi dan bermanfaat bagi pembaca.

Padang, November 2022

Penulis,  
Elisa Putri Masni

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>14</b>
A. Kajian Teori	
1. Teori Agensi ( <i>Agency Theory</i> ) .....	14
2. Kecurangan ( <i>Fraud</i> ).....	15
3. Dana Desa.....	17
4. Akuntabilitas.....	27
5. Kesesuaian Kompensasi.....	30
6. Pengendalian Internal.....	31
7. Budaya Organisasi.....	35
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	36
C. Perbedaan Penelitian Ini Dengan Penelitian Terdahulu.....	38
D. Pengembangan Hipotesis.....	43
1. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kecurangan Dana Desa.....	43
2. Pengaruh Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecurangan Dana Desa.....	44
3. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan Dana Desa.....	45
4. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kecurangan Dana Desa.....	47
E. Kerangka Konseptual.....	48

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Populasi dan Sampel.....	50
C. Jenis dan Sumber Data.....	51
D. Metode Pengumpulan Data.....	52
E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	52
1. Variabel Dependen.....	52
2. Variabel Independen.....	53
F. Teknik Analisis Data.....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	60
B. Demografi Responden.....	60
C. Deskripsi Variabel Penelitian.....	63
D. Hasil Analisis Data.....	71
1. Hasil Statistik Deskriptif .....	71
2. Hasil Uji Kualitas Data.....	73
3. Hasil Uji Asumsi Klasik .....	75
4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	79
5. Hasil Analisis Koefisien Determinasi.....	81
6. Hasil Uji Hipotesis.....	82
E. Pembahasan Hasil Penelitian .....	85
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan .....	91
B. Keterbatasan Penelitian.....	92
C. Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>102</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ikhtisar Penelitian Terdahulu.....	39
Tabel 2. Tingkat Pengembalian Kuesioner.....	60
Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	61
Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..	61
Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan.....	62
Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja di Bidang Pengelolaan Dana Desa.....	62
Tabel 7. Deskripsi Variabel Akuntabilitas .....	64
Tabel 8. Deskripsi Variabel Kesesuaian Kompensasi.....	66
Tabel 9. Deskripsi Variabel Sistem Pengendalian Internal .....	67
Tabel 10. Deskripsi Variabel Budaya Organisasi .....	69
Tabel 11. Deskripsi Variabel Kecurangan Dana Desa .....	70
Tabel 12. Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	71
Tabel 13. Hasil Uji Validitas .....	74
Tabel 14. Hasil Uji Reliabilitas .....	75
Tabel 15. Hasil Uji Normalitas.....	76
Tabel 16. Hasil Uji Multikolinearitas .....	77
Tabel 17. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	78
Tabel 18. Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	79
Tabel 19. Hasil Analisis Koefisien Determinasi .....	81
Tabel 20. Hasil Uji f .....	82
Tabel 21. Hasil Uji t .....	83

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang dalam mengurus serta mengatur urusan pemerintahan, dan keperluan masyarakat daerah berdasarkan gagasan masyarakat, hak asal usul serta hak tradisional, yang dihormati serta diakui di dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mardiasmo, 2002). Desa telah diberikan wewenang serta sumber dana memadai yang berguna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa (Wati dan Yuniasih, 2021). Dana anggaran pendapatan serta belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga serta disalurkan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Semua pendapatan desa diterima serta disalurkan melalui rekening kas Desa kemudian penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa (Mardiasmo, 2002). Pada rekening kas desa pencairan dana ditandangani oleh Bendahara Desa serta Kepala Desa. Selanjutnya anggaran pendapatan serta belanja negara digunakan oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan kewenangan desa.

Dana desa yang Pemerintah pusat berikan bertujuan untuk menunjang Pemerintah Desa dalam melaksanakan setiap program pembangunan yang berada pada desa tersebut, hal ini adalah wujud salah satu program untuk desa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat (Arthana, 2019). Pemerintah berharap dengan adanya dana desa pelayanan publik bisa ditingkatkan menuju arah yang lebih baik, kemudian masyarakat desa bisa berdaya dan maju, serta yang sangat utama desa

bisa menjadi subjek pembangunan. Selain menghitung capaian serta efek positif dana desa, hal penting serta perlu menjadi pokok pembahasan yaitu terkait permasalahan yang datang serta tantangan kedepan. Karena dana desa memiliki anggaran yang lumayan besar, dengan adanya hal tersebut pihak yang tidak bertanggungjawab sering menyalahgunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi ataupun sekelompok orang sehingga mengakibatkan negara mengalami kerugian (Wati dan Yuniasih, 2021).

Perilaku kecurangan (*fraud*) merupakan suatu hal yang dapat merugikan orang lain dimana hal ini termasuk suatu pelanggaran yang kerap terjadi serta secara sadar dilakukan oleh sejumlah orang untuk kepentingan pribadinya. Ariani et al., (2015) pada penelitiannya menyatakan bahwa perilaku kecurangan dapat membahayakan institusi yang dikelola. Selain itu, Ariani et al., (2015) menyatakan bahwa dalam definisi serta terminologi kecurangan bisa dikatakan sebagai kecenderungan korupsi karena keikutsertaan beberapa elemen yang terdiri dari pengungkapan informasi menyesatkan, kemudian pelanggaran aturan serta menyalahgunakan kepercayaan dan omisi fakta kritis.

Pada penelitian Pradnyanitasari et al., (2021) menyatakan bahwa tindakan kecurangan (*fraud*) bisa memberikan keuntungan bagi orang yang melakukannya, serta juga memberikan dampak buruk sehingga akan berdampak pada rusaknya reputasi usaha, serta institusi dan juga kerugian serta kerusakan akhlak bagi kelompok yang melakukannya. Tindakan kecurangan (*fraud*) biasanya terjadi dalam suatu perusahaan, akan tetapi dalam lingkungan pemerintahan pun juga terjadi saat ini.

Berdasarkan perbuatan ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) membagi kecurangan (*fraud*) dalam tiga jenis atau tipologi (ACFE, 2016) yaitu pertama penyalahgunaan aset. Jenis ini mencakup pencurian/penyalahgunaan aset atau harta perusahaan ataupun pihak lain. Ini merupakan bentuk *fraud* yang sangat mudah dideteksi sebab sifatnya yang *tangible* atau bisa diukur/dihitung (*defined value*). Kedua adalah pernyataan palsu atau kecurangan pada laporan keuangan. Meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan. Dan ketiga korupsi, tindakan ini banyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Kecurangan atau *fraud* jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (*simbiosis mutualisme*). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

Salah satu jenis kecurangan yang biasanya sering terjadi yaitu terkait korupsi. Dimana KPK yaitu Komisi Pemberantas Korupsi sudah banyak mengungkap kasus korupsi yang ada di Indonesia. Kasus tersebut bukan hanya terjadi di pemerintahan pusat, namun korupsi dapat juga terjadi di lingkungan desa meskipun lingkup pemerintahannya kecil (Fitriyah & Munari, 2021). Korupsi merupakan kasus dari kecurangan yang sering terjadi pada instansi pemerintahan.

Kasus korupsi ini pun menjadi hal penting karena kejadian ini memberi pengaruh pada perekonomian dan stabilitas Negara (Sari, Arza & Taqwa, 2019).

ICW yaitu *Indonesia Corruption Watch* mencatat selama tahun 2015-2018 terkait kasus korupsi anggaran dana desa yaitu sebanyak 252 kasus. Jumlah tersebut rata-rata diketahui naik setiap tahunnya, yaitu tahun 2015 ada 22 kasus kemudian tahun 2016 ada 48 kasus. Seterusnya tahun 2017 dan tahun 2018 meningkat kembali menjadi 98 serta 96 kasus. ICW mencatat terdapat sekiranya 231 kepala desa yang terjaring kasus korupsi, sehingga sepanjang 2015-2018 mengakibatkan negara merugi Rp 107,7 miliar. Egi menjelaskan, dalam penyaluran dana desa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI juga turut menemukan masalah.

Berdasarkan audit BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2018, ditemukan penyaluran dana desa oleh pemerintah tidak berdasarkan data yang mutakhir (Republika.co.id). Hal tersebut dibuktikan atas hadirnya beberapa kasus terkait penyalahgunaan anggaran negara. Salah satu diantaranya adalah dugaan kasus korupsi dana desa di Kota Pariaman. Desa tersebut yaitu Desa Manggung, Kecamatan Pariaman Utara serta Kampung Baru Padusunan, Kecamatan Pariaman Timur. Azman Tanjung selaku kepala Kejari Pariaman mengatakan bahwa yang termasuk tahap penyelidikan adalah kasus pembangunan kantor desa manggung pada tahun anggaran 2017 dan 2018 serta penyimpangan penggunaan BPBDesa Kampung Baru Padusunan tahun 2019 dan 2020. Sedangkan dugaan korupsi yang sudah masuk pada tahap penyidikan yaitu terkait penyertaan modal badan usaha milik desa Manggung yaitu membangun wahana sepeda

gantung tahun 2019. Kasi Pidana Khusus Kejari Pariaman yaitu Yuharmen, mengatakan bahwa dari pemeriksaan auditor inspektorat Kota Pariaman kerugian negara ditaksir mencapai Rp 125 Juta. Selain itu beliau menjelaskan dalam pembangunan wahana sepeda gantung pihaknya menemukan adanya mekanisme pengerjaan yang tidak semestinya dan bahkan tidak ditemukan adanya pelelangan atau pun penunjukkan (Sumbar.antaraneews.com, 2021).

Kasus terkait penyalahgunaan keuangan desa menyebabkan kegundahan bagi masyarakat serta pemerintah secara umum, apabila dianalisis secara mendalam pemerintah sebenarnya sudah menetapkan berbagai aturan serta pedoman terkait keuangan desa dengan harapan proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa bisa dilaksanakan dengan mudah sehingga tidak menimbulkan kecurigaan serta bahkan menimbulkan potensi kecurangan dalam pelaksanaannya (Wati & Yuniasih, 2021). Biasanya potensi kecurangan terjadi dalam proses pembangunan dan penyusunan pelaporan keuangan misalnya pemalsuan, manipulasi data atau mengubah dokumen-dokumen pendukung dalam menyusun laporan keuangan. Dalam mengelola keuangan, aparat desa harus harus membuat pelaporan yang sesuai dengan tenggat waktu. Potensi untuk melakukan kecurangan dapat timbul karena adanya celah dan lemahnya pengendalian untuk mencegah dan medeteksi pelanggaran (Alfaruqi & Kristianti, 2019).

Pemerintah sebagai pengemban amanat dari rakyat mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugasnya secara efektif serta efisien, yang mana salah satunya adalah mengurus keuangan negara secara benar serta bertanggungjawab. Akan

tetapi kenyataannya *fraud* pada sektor Pemerintahan Desa sendiri masih sering terjadi (Wati & Yuniasih, 2021). Sebagai pelaku pemerintahan, Pemerintah Daerah harus bertanggungjawab terhadap masyarakat terkait apa yang sudah dilakukannya yaitu dalam rangka menjalankan tugas, dan wewenang, serta kewajiban Pemerintah Daerah (Oktaviani, Herawati, dan Atmadja, 2017). Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan Dana Desa antara lain dikarenakan akuntabilitas yang rendah. Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) kepada pihak pemberi amanah (*principal*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan semua aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Asmawati & Basuki (2019) menyatakan bahwa Akuntabilitas mengandung makna pertanggungjawaban dari semua pilihan serta tindakannya. Misal, pada proses pembukuan akuntansi serta administrasi keuangan perangkat desa harus transparan serta responsibel sehingga pengelolaan keuangan atau pelaporannya menjadi transparan, akuntabel serta transparatif, sehingga hal ini bisa meminimalkan potensi kecurangan di dalam pengelolaan keuangan desa.

Akuntabilitas mempunyai peran yang penting sekali di dalam Pemerintahan Desa yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada desa itu sendiri serta bisa menjamin kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Desa untuk meningkatkan akuntabilitas serta transparansi, dengan keterbukaan serta tanggung jawab yang tinggi karna bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperuntukkan untuk desa serta masyarakat desa bisa berjalan dengan benar (Budiarti, 2021). Pada

penelitian Oktaviani, Herawati, dan Atmadja (2017) serta penelitian Sari, Arza, dan Taqwa (2019) menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif serta signifikan terhadap potensi fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat menginterpretasikan bahwa kecurangan ataupun potensi *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa bisa diminimalisir dengan dilakukannya praktek akuntabilitas.

Faktor lain yang memicu terjadinya kecurangan yaitu terkait kesesuaian kompensasi. Permata et al (2017) menyatakan bahwa kompensasi merupakan salah satu motivasi penting yang ikut mendorong pegawai untuk berprestasi. Sehingga, tinggi rendahnya kompensasi yang diberikan akan mempengaruhi kinerja pegawai. Pada penelitian Noprianto, Rahayu & Yudi (2020), Suwatno & Priansa (2016) menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi merupakan salah satu hal yang mendorong seseorang untuk melakukan pekerjaan sehingga orang tersebut tergerak untuk mendapatkan kompensasi tersebut. Meliany & Hernawati, (2013) menyatakan kompensasi yang diperoleh staf/perangkat desa mesti sesuai dengan kontribusi yang diberikan perangkat desa kepada organisasi. Dampak atas ketidakpuasan terhadap kompensasi bisa melambatkan kinerja serta menimbulkan potensi kecurangan. Sebaliknya pada penelitian Arthana (2019), Gibson, et al. (1997) menyatakan bahwa pemberian kompensasi yang sesuai kepada karyawan dapat memberikan kepuasan dan motivasi kepada karyawan dalam bekerja, sehingga mendorong mereka untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan tempat mereka bekerja. Lebih lanjut, pada penelitian Arthana (2019), Thoyibatun

(2009) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa kesesuaian kompensasi bisa meminimalisir terjadinya potensi kecurangan.

Selain itu, faktor lain yang mendorong terjadinya kecurangan dikarenakan rendahnya pengendalian internal. Pengendalian internal menurut Tuanakotta (2014:352) adalah proses, kebijakan, dan prosedur yang didesain manajemen guna memastikan pelaporan keuangan yang andal dan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan kerangka akuntansi yang berlaku. Permatasari et. al (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif merupakan komponen penting dalam pemerintahan dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional yang sehat dan aman. Sistem pengendalian intern yang efektif dapat membantu pemerintah dalam menjaga aset, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Menurut (Tuanakotta, 2015:93) pengendalian internal bisa didefinisikan sebagai reaksi terhadap ancaman, yang mana hal itu dikarenakan bila tidak bisanya pengendalian internal sebagai jawaban dari ancaman maka hal itu akan sia-sia. Kecakapan aparatur dan sistem pengendalian internal sangat mempengaruhi pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan desa (Atmadja & Saputra, 2017). Sebab, pengendalian internal yang baik dapat mencegah terjadinya potensi kecurangan. (Alfaruqi, & Kristianti, 2019).

Wijayanti & Hanafi (2018) menyatakan bahwa pengendalian internal yaitu aturan pada organisasi yang dibentuk serta dibuat demi mencapai misi yang sudah ditentukan pada organisasi, selain itu juga berguna untuk mengelola serta mengidentifikasi resiko yang mungkin terjadi pada suatu organisasi. Febriani & Suryandari (2019) menyatakan potensi kecurangan dapat dicegah jika *internal control*nya efektif. Maka dari itu supaya peluang tersebut bisa dicegah maka dalam organisasi dibutuhkan berjalan secara efektifnya sistem pengendalian internal. Jika pada suatu organisasi efektivitas pengendalian internal semakin kuat maka kemungkinan terjadinya potensi *fraud* pada organisasi semakin mengecil. Karena adanya pengendalian internal sedini mungkin maka potensi kecurangan dapat dideteksi dari awal.

Pada penelitian Fitriyah dan Munari (2021), Soemarso (2018:333) menyatakan bahwa pengendalian internal bisa disebut efektif apabila memenuhi tiga syarat yaitu (keberadaan, serta berfungsi, dan terintegrasi). Sebaliknya pada penelitian Wati & Yuniasih (2021), Peterson & Gibson (2003) menyatakan bahwa penyebab yang memungkinkan *fraud* akan terjadi dikarenakan prosedur pengendalian internal yang buruk. Artinya apabila tidak efektifnya pengendalian internal, maka akan mudah terjadi *fraud* sehingga akan berakibat buruk pada perusahaan ataupun organisasi.

Selain itu, faktor lain yang memicu kecurangan adalah budaya organisasi. Pada penelitian Munari et al., (2021), Robbins (2003) menjelaskan terkait budaya organisasi, dimana budaya organisasi bisa didefinisikan sebagai sebuah sistem yang

mempunyai ciri khas utama buat dihargai serta diikuti oleh semua elemen organisasi, sehingga bisa sebagai pembeda dari organisasi lainnya. Mustikasari (2013) pada penelitian yang telah dilakukannya menunjukkan bahwa jika dalam suatu organisasi itu mempunyai budaya yang tidak sesuai serta memandang suatu kecurangan merupakan hal yang biasa ataupun telah lumrah terjadi maka hal ini akan membuat setiap orang berniat untuk melakukan kecurangan dalam organisasi tersebut sehingga hal tersebut mengakibatkan terjadi potensi kecurangan.

Sebaliknya budaya etis manajemen berpengaruh negatif terhadap *fraud*, artinya jika budaya yang dianut oleh manajemen atau organisasi semakin baik maka bisa mengurangi adanya *fraud*. Provita Wijayanti & Hanafi, (2018) menyatakan bahwa budaya etis organisasi bisa pula sebagai faktor pengendali *fraud*. Selain itu Widiyarta et al. (2017) pada penelitiannya mendapatkan hasil bahwa pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa di pengaruhi secara positif serta signifikan oleh budaya organisasi.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian Sari, Arza & Taqwa (2019). Perbedaan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh Sari, Arza & Taqwa (2019) dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yaitu penelitian sebelumnya fokus ke potensi kecurangan sedangkan penelitian ini fokus ke kecurangan, kemudian sampel yang diambil, serta tempat dan waktu penelitian yang berbeda. Selain itu berdasarkan saran dari penelitian terdahulu (Sari, Arza & Taqwa, 2019) oleh karena itu pada penelitian ini penulis menambahkan variabel independen budaya organisasi.

Berdasarkan kasus yang sudah disebutkan tersebut, maka pentingnya penelitian ini dilakukan di Kota Pariaman. Berdasarkan fenomena yang sudah dijelaskan diatas mengenai kecurangan dana desa, oleh karena itu penting untuk mengetahui faktor-faktor yang memotivasi pegawai aparatur desa untuk melakukan sebuah tindakan kecurangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk menguji apakah akuntabilitas, kesesuaian kompensasi, pengendalian internal, dan budaya organisasi berpengaruh terhadap kecurangan dana desa. Oleh karena itu judul penelitian ini yaitu “**Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Internal, dan Budaya Organisasi Terhadap Kecurangan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa di Kota Pariaman)**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap kecurangan dana desa pada pemerintah desa di Kota Pariaman?
2. Bagaimana pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan dana desa pada pemerintah desa di Kota Pariaman?
3. Bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap kecurangan dana desa pada pemerintah desa di Kota Pariaman?
4. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap kecurangan dana desa pada pemerintah desa di Kota Pariaman?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kecurangan dana desa pada pemerintah desa di Kota Pariaman
2. Untuk mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan dana desa pada pemerintah desa di Kota Pariaman
3. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap kecurangan dana desa pada pemerintah desa di Kota Pariaman
4. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kecurangan dana desa pada pemerintah desa di Kota Pariaman

### **D. Manfaat Penelitian**

Berikut manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan peneliti, terutama terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) dana desa, sehingga peneliti bisa mempelajari secara mendalam mengenai topik tersebut.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan ataupun pedoman untuk penelitian selanjutnya terutama untuk topik yang membahas tentang kecurangan (*fraud*) dana desa.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan ataupun bahan evaluasi bagi pemerintah, khususnya pemerintah desa dalam hal pengelolaan terhadap dana desa.

#### 4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan edukasi maupun informasi kepada masyarakat yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dana desa sehingga masyarakat akan meningkatkan partisipasinya dalam mengontrol kinerja aparatur desa agar terarah ke arah yang sesuai dengan tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga diharapkan kedepannya tidak terulang kembali potensi kecurangan (*fraud*) terhadap dana desa.

## **BAB II**